

TUGAS PROJECT PORTOFOLIO

PEMERIKSAAN AKUNTANSI (AUDITING)

(Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Matakuliah Pemeriksaan Akuntansi)

Dosen Pengampu :

Dr. Mega Metalia, S.E., M. Si., M. S. Ak., Ak., CA.

Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh :

Dita Silviana Putri (2313031057)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2026

ANALISIS JURNAL INTERNASIONAL 1

1. IDENTITAS JURNAL

Nama Jurnal	:	<i>European Journal of Business and Management Research</i>
Judul Jurnal	:	<i>Corporate Governance and the Quality of Audit Process: An Exploratory Analysis Considering Internal Audit, Audit Committee and Board of Directors</i>
Penulis	:	Nashat Ali Almasria
Volume	:	7
Nomor	:	1
Halaman	:	78-99
ISSN	:	2507-1076
Tahun Terbit	:	Januari 2022
Link Jurnal	:	http://dx.doi.org/10.24018/ejbmr.2022.7.1.1210

2. ANALISIS JURNAL

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Internal dan kualitas proses audit eksternal serta mekanisme tata kelola apa saja yang dapat memengaruhi beberapa aspek kualitas proses audit eksternal. Penelitian ini juga merupakan studi eksploratif yang mendalami keterkaitan antara mekanisme tata kelola perusahaan internal atau Internal Corporate Governance Mechanisms (ICGMs) dengan kualitas proses audit eksternal (External Audit Process Quality). Penelitian ini sangat penting, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Yordania, karena fenomena kegagalan audit serta lemahnya pengawasan internal kerap menjadi akar permasalahan dalam berbagai skandal keuangan dan rendahnya akuntabilitas perusahaan. Dengan latar belakang tersebut, studi ini mencoba menggali bagaimana peran audit internal, komite audit, dan dewan direksi dapat meningkatkan kualitas audit melalui kerja sama dan koordinasi yang efektif dengan auditor eksternal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi-terstruktur terhadap 206 auditor eksternal di Yordania, di mana 13 di antaranya terlibat dalam wawancara mendalam. Data dianalisis dengan pendekatan thematic analysis, sebuah metode yang memungkinkan peneliti untuk menemukan pola tematik dalam data naratif berdasarkan pengalaman dan persepsi partisipan. Hasil analisis

menunjukkan bahwa kualitas audit eksternal tidak hanya bergantung pada independensi dan keterampilan auditor eksternal semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sinergi dan kualitas hubungan antara auditor dengan mekanisme pengawasan internal di perusahaan. Dalam konteks ini, audit internal yang bekerja secara profesional dan independen dapat memberikan informasi yang berguna dan relevan untuk perencanaan dan pelaksanaan audit eksternal, terutama dalam hal pengumpulan bukti audit dan penilaian risiko. Komunikasi yang terjalin antara auditor eksternal dan auditor internal terbukti mampu mempercepat pemahaman terhadap proses bisnis klien dan memungkinkan auditor eksternal menyusun prosedur audit yang lebih tepat sasaran.

Komite audit juga memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendorong efektivitas pengawasan dan menjaga transparansi laporan keuangan. Komite audit yang aktif dan kompeten akan memastikan bahwa proses audit berjalan sesuai dengan standar, memberikan ruang diskusi bagi auditor eksternal untuk menyampaikan temuan-temuan audit, serta menindaklanjuti rekomendasi secara konkret. Selain itu, dewan direksi yang terbuka terhadap dialog audit dan peduli terhadap perbaikan sistem pengendalian internal juga terbukti memberikan kontribusi penting terhadap kualitas hasil audit. Temuan studi ini menyebutkan bahwa ketika dewan direksi mengambil peran pengawasan yang aktif, auditor merasa lebih didukung dan termotivasi untuk menyampaikan laporan secara objektif, bahkan jika temuan audit bersifat sensitif.

Selain berfokus pada mekanisme pengawasan internal, jurnal ini juga mengangkat isu mengenai kualitas personal auditor itu sendiri. Penulis menegaskan bahwa kompetensi, pengalaman, dan tingkat skeptisisme profesional auditor memiliki hubungan langsung dengan kualitas audit. Auditor dari firma besar seperti Big Four umumnya lebih dipercaya dan mampu mempertahankan independensi mereka dibanding auditor dari firma kecil yang seringkali menghadapi konflik kepentingan akibat hubungan yang terlalu dekat dengan klien. Selain itu, auditor dari firma besar juga lebih sering melakukan audit berbasis risiko dan memiliki sumber daya yang mendukung pelaksanaan audit sesuai dengan standar internasional. Dengan demikian, kualitas audit menjadi hasil dari sinergi antara faktor eksternal auditor dan kekuatan pengawasan internal klien.

Dalam kerangka teoritis, penelitian ini mengadopsi pandangan dari teori agensi (agency theory) yang menekankan pentingnya pengawasan untuk mengatasi konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Mekanisme pengawasan internal berfungsi sebagai pengontrol perilaku manajemen agar lebih

transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, studi ini juga selaras dengan teori sumber daya (resource-based theory) yang menempatkan mekanisme tata kelola internal sebagai aset strategis perusahaan yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan citra perusahaan di mata investor. Penelitian ini menyarankan agar organisasi tidak hanya mengandalkan peran auditor eksternal, tetapi juga memperkuat peran pengawasan internal melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan independensi, dan peningkatan kualitas komunikasi antar unit pengawasan.

Penelitian ini berhasil memberikan kontribusi yang sangat penting dalam memperkaya literatur tentang tata kelola perusahaan dan audit, terutama di kawasan negara berkembang. Penulis memberikan pemahaman yang lebih dalam bahwa kualitas audit bukanlah hasil dari kerja tunggal auditor eksternal, melainkan produk dari sistem pengawasan yang terintegrasi di dalam perusahaan. Mekanisme seperti audit internal, komite audit, dan dewan direksi tidak boleh dipandang sebagai struktur simbolik, melainkan harus diberdayakan secara nyata agar dapat memberikan nilai tambah bagi kualitas proses audit. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya adanya lembaga independen yang dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pengawasan internal, seperti halnya badan akuntan publik yang mengawasi auditor eksternal.

Secara keseluruhan dapat saya simpulkan dari analisis jurnal ini menegaskan bahwa kualitas proses audit eksternal sangat dipengaruhi oleh efektivitas mekanisme tata kelola internal perusahaan. Audit internal, komite audit, dan dewan direksi memiliki peran strategis yang apabila dijalankan secara kolaboratif dan profesional dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan laporan keuangan perusahaan. Temuan ini menekankan bahwa keberhasilan audit tidak hanya bergantung pada kualitas auditor eksternal, tetapi juga pada sejauh mana perusahaan mampu menciptakan sistem pengawasan internal yang kuat dan berintegritas. Dalam konteks Indonesia maupun negara berkembang lainnya, hasil studi ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan tata kelola yang lebih efektif, serta memperkuat struktur internal sebagai bagian dari upaya membangun sistem audit yang kredibel dan berkelanjutan.

ANALISIS JURNAL INTERNASIONAL 2

1. IDENTITAS JURNAL

Nama Jurnal	:	<i>The International Journal of Accounting</i>
Judul Jurnal	:	<i>The Quality of Mandatory Non-Financial (Risk) Disclosures: The Moderating Role of Audit Firm and Partner Characteristics</i>
Penulis	:	Saverio Bozzolan & Antti Miihkinen
Volume	:	56
Nomor	:	2
Halaman	:	1-55
ISSN	:	1094-4060
Tahun Terbit	:	Mei 2021
Link Jurnal	:	https://doi.org/10.1142/S1094406021500086

2. ANALISIS JURNAL

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi secara empiris hubungan antara kualitas pengungkapan risiko yang diwajibkan secara hukum dan karakteristik dari pihak auditor, baik pada tingkat firma maupun tingkat personal (audit partner), dalam konteks regulasi yang mengharuskan adanya assurance positif dari auditor eksternal terhadap pengungkapan risiko di bagian Operating and Financial Review (OFR) dari laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini dilakukan di Finlandia, yang merupakan salah satu dari sedikit negara dengan rezim assurance positif untuk pengungkapan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas literatur mengenai assurance atas informasi non-keuangan, dan sekaligus mengisi kekosongan studi terdahulu yang cenderung lebih berfokus pada laporan keuangan dan assurance negatif.

Penelitian ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan akan informasi non-keuangan, khususnya pengungkapan risiko, yang dinilai sangat penting oleh investor dan pemangku kepentingan dalam menilai kondisi perusahaan secara menyeluruh. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah kualitas pengungkapan risiko yang diaudit dalam laporan tahunan perusahaan dikaitkan dengan tipe kantor akuntan publik (Big-4 atau non-Big-4), karakteristik dari kantor audit tersebut, serta atribut individual dari mitra audit (audit partner).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuasi-eksperimen berdasarkan data dari perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Helsinki pada periode

2005–2009, yakni masa di mana standar baru mengenai pengungkapan risiko diberlakukan. Standar ini mengharuskan perusahaan untuk menyajikan informasi risiko secara rinci dan berimbang, dan mengharuskan auditor memberikan assurance positif terhadap informasi tersebut. Metode pengumpulan data mencakup pengkodean manual atas konten laporan OFR yang mencakup lima topik risiko utama: risiko strategis, operasional, keuangan, kerusakan, dan manajemen risiko. Kualitas pengungkapan risiko kemudian diukur melalui tiga dimensi: kuantitas (jumlah kata), keseimbangan (keragaman topik risiko), dan cakupan (jumlah topik yang diungkap), yang dikombinasikan dalam indeks faktor tunggal sebagai ukuran kualitas pengungkapan risiko secara keseluruhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan dari keterlibatan audit firm Big-4 terhadap kualitas pengungkapan risiko. Dengan kata lain, afiliasi perusahaan dengan kantor audit besar seperti Big-4 tidak menjamin pengungkapan risiko yang lebih baik. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik individu dari mitra audit memiliki pengaruh yang jauh lebih signifikan. Mitra audit yang memiliki tingkat paparan lebih tinggi terhadap laporan risiko dari berbagai klien, yang memiliki pengalaman lintas industri, serta mitra audit perempuan cenderung menghasilkan kualitas assurance yang lebih tinggi terhadap pengungkapan risiko non-keuangan. Hal ini memperkuat literatur yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak hanya ditentukan oleh reputasi lembaga, tetapi juga oleh keterampilan, pengalaman, dan bahkan karakter personal dari auditor.

Secara lebih rinci, pengalaman audit partner dalam menangani berbagai klien dengan karakteristik risiko berbeda memberikan keunggulan dalam memahami bagaimana pengungkapan risiko yang baik seharusnya dilakukan. Penelitian ini juga menemukan bahwa spesialisasi industri audit partner justru tidak selalu memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan, suatu temuan yang cukup mengejutkan dan berbeda dari literatur sebelumnya yang menyatakan bahwa spesialisasi meningkatkan kualitas audit. Selain itu, efek gender juga diidentifikasi, di mana audit partner perempuan terbukti lebih mampu meningkatkan kualitas assurance atas informasi non-keuangan. Penulis mengaitkan hal ini dengan kemampuan perempuan yang lebih tinggi dalam pemrosesan informasi, sensitivitas terhadap risiko, serta kecenderungan untuk lebih komunikatif dan teliti dalam pelaporan.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris bahwa karakteristik individu mitra audit lebih penting daripada afiliasi kelembagaan audit firm

dalam konteks assurance terhadap pengungkapan risiko non-keuangan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya desain regulasi pengungkapan yang jelas, seperti yang terdapat dalam standar risiko Finlandia, yang memberikan acuan eksplisit bagi auditor dalam menilai pengungkapan risiko. Hal ini penting karena pengungkapan risiko bersifat naratif dan sering kali subjektif, sehingga tanpa kerangka regulasi yang ketat, assurance dari auditor cenderung hanya bersifat formalitas dan tidak substantif. Selain itu, temuan ini juga menambah pemahaman tentang bagaimana struktur kelembagaan dan faktor-faktor personal dapat memengaruhi kualitas pelaporan, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas informasi yang diterima oleh investor.

Dalam konteks praktis, penelitian ini memiliki implikasi penting bagi regulator, perusahaan audit, dan pembuat kebijakan. Regulasi mengenai pengungkapan risiko perlu tidak hanya mewajibkan assurance, tetapi juga memberikan kerangka yang jelas dan terukur agar auditor dapat memberikan penilaian yang kredibel. Di sisi lain, perusahaan audit sebaiknya tidak hanya mengandalkan reputasi firma, tetapi juga memperhatikan pengembangan profesional dari audit partner, termasuk peningkatan eksposur lintas klien, lintas industri, dan keberagaman gender. Penelitian ini juga mendukung inisiatif terbaru Uni Eropa yang mewajibkan pengungkapan informasi non-keuangan dengan assurance, seperti yang tertuang dalam European Directive 2014/95/EU.

Dengan demikian, dapat saya simpulkan pada jurnal ini menyampaikan pesan penting bahwa dalam konteks pengungkapan risiko non-keuangan yang diwajibkan secara regulasi dan diaudit secara positif, kualitas dari pengungkapan tersebut lebih ditentukan oleh siapa audit partner-nya, bukan oleh besarnya nama kantor akuntan publik. Temuan ini menantang asumsi lama tentang superioritas audit firm besar dan menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap kapabilitas individu auditor, terutama dalam bidang yang membutuhkan penilaian profesional yang tinggi seperti assurance atas informasi naratif. Penelitian ini tidak hanya menambah wawasan teoretis dalam bidang auditing dan corporate disclosure, tetapi juga memberikan arahan praktis yang jelas bagi pengembangan profesi audit di masa depan.

ANALISIS JURNAL INTERNASIONAL 3

1. IDENTITAS JURNAL

Nama Jurnal	:	<i>ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives</i>
Judul Jurnal	:	<i>Current State and Challenges in the Implementation of Smart Robotic Process Automation in Accounting and Auditing</i>
Penulis	:	Max Gotthardt, Dan Koivulaakso, Okyanus Paksoy, Cornelius Saramo, Minna Martikainen, Othmar Lehner
Volume	:	9
Nomor	:	1
Halaman	:	90-102
ISSN	:	2305-7394
Tahun Terbit	:	Mei 2020
Link Jurnal	:	https://doi.org/10.35944/jofrp.2020.9.1.007

2. ANALISIS JURNAL

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi terkini serta hambatan-hambatan praktis dan strategis dalam mengintegrasikan sistem RPA dan AI di lingkungan akuntansi dan audit, baik pada skala makro (perusahaan global besar) maupun mikro (perusahaan lokal kecil). Studi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi risiko utama, kebutuhan perubahan kelembagaan, serta bagaimana teknologi ini berpotensi mengubah peran auditor dan akuntan di masa depan. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi otomatisasi proses robotik atau Robotic Process Automation (RPA) dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam bidang akuntansi dan audit.

Penelitian ini memaparkan bahwa meskipun perkembangan teknologi digital telah pesat, adopsi RPA dan AI di perusahaan-perusahaan masih dalam tahap awal. Hanya sekitar 15% perusahaan merasa telah cukup matang dalam penggunaan RPA, dan bahkan hanya 5% dalam AI. Padahal, potensi manfaat dari otomatisasi ini sangat besar, terutama dalam efisiensi proses bisnis, pengurangan beban kerja manual, peningkatan akurasi, serta penghematan biaya tenaga kerja secara signifikan. Namun, berbagai kendala menghambat implementasi yang efektif, mulai dari keterbatasan infrastruktur data, kekurangan keterampilan teknis di internal perusahaan, hingga resistensi budaya organisasi terhadap perubahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi RPA dan AI sangat ditentukan oleh kesiapan sistem internal perusahaan, struktur dan kualitas data yang tersedia, serta komitmen dari pihak manajemen untuk berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Penelitian ini mengungkap bahwa perusahaan yang memiliki data terstruktur, kesiapan digital yang baik, dan sistem administrasi keuangan yang terintegrasi memiliki peluang lebih besar untuk mengadopsi RPA dan AI secara efektif. Sebaliknya, organisasi yang masih bergantung pada proses manual dan spreadsheet konvensional sering menghadapi kendala dalam mengotomatisasi proses bisnis, yang berujung pada rendahnya efisiensi dan akurasi pelaporan.

Penelitian ini juga menyajikan pendekatan yang menyeluruh dengan menggabungkan ulasan literatur yang mendalam, studi kasus praktis, serta wawancara dengan para profesional di bidang akuntansi dan audit, termasuk dari perusahaan besar dan startup teknologi. Dua studi kasus menjadi sorotan utama dalam artikel ini. Pertama adalah studi terhadap perusahaan perangkat lunak global yang mengembangkan platform otomatisasi (UiPath), dan kedua adalah startup Finlandia bernama Salaxy yang mengadopsi teknologi pembayaran gaji secara otomatis dan cerdas. Melalui kedua studi kasus ini, peneliti menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi RPA sangat tergantung pada struktur data, kesiapan digital, dan komitmen manajemen dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam alur kerja perusahaan. RPA dan AI berada di dua ujung spektrum otomatisasi. RPA berfokus pada tugas-tugas berbasis aturan yang dapat diprogram, seperti entri data dan transfer antar sistem, sedangkan AI membutuhkan data berkualitas tinggi untuk belajar dan membuat keputusan secara mandiri. AI mencakup teknologi seperti *machine learning*, *natural language processing*, dan *optical character recognition* yang memungkinkan sistem untuk menganalisis, mengekstrak, dan bahkan menghasilkan informasi. Dalam konteks audit dan akuntansi, kombinasi keduanya membuka peluang besar, seperti pengujian data populasi secara menyeluruh (bukan hanya sampel), pelaporan otomatis, hingga deteksi penipuan berbasis pola transaksi mencurigakan.

Namun demikian, para penulis juga menekankan bahwa tantangan besar hadir dalam bentuk struktur data yang tidak standar, kurangnya integrasi antar sistem, serta perlunya pengawasan manusia dalam proses pengambilan keputusan. Risiko keamanan siber, potensi manipulasi AI, serta kebutuhan untuk memahami dan menjelaskan keputusan AI kepada pemangku kepentingan juga menjadi sorotan. Oleh karena itu,

aspek *transparansi* dan *governance* menjadi sangat penting dalam penerapan teknologi ini. Dalam dunia audit, ini berarti bahwa teknologi tidak boleh menjadi kotak hitam yang tak dapat dijelaskan, melainkan sistem yang dapat diaudit, diverifikasi, dan dipahami oleh manusia.

Dari sisi organisasi, studi ini menekankan pentingnya edukasi bagi manajemen tingkat atas, karena banyak kegagalan implementasi teknologi justru terjadi akibat kesenjangan pengetahuan antara teknisi dan pengambil keputusan. Selain itu, studi ini menggarisbawahi perlunya uji coba (*proof of concept*) sebelum peluncuran penuh sistem, agar risiko finansial dan operasional dapat diminimalkan. Penulis juga mengingatkan bahwa meskipun RPA sangat menjanjikan, ia bukanlah solusi universal. Banyak perusahaan tergoda mengikuti tren tanpa mengevaluasi kebutuhan spesifik mereka, sehingga menghasilkan implementasi yang tidak efektif.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menyatakan bahwa potensi RPA dan AI dalam bidang akuntansi dan audit sangat besar dan sedang mulai dimanfaatkan secara progresif. Penggunaan teknologi ini memungkinkan otomatisasi terhadap sejumlah besar tugas manual, yang selama ini membutuhkan intervensi manusia. Hal ini membuka peluang penghematan waktu dan biaya yang signifikan, namun juga memperkenalkan tantangan baru seperti kualitas data, keamanan sistem, dan kebutuhan akan strategi implementasi yang jelas dan bertanggung jawab. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan dalam mengadopsi teknologi ini sangat bergantung pada kesiapan organisasi dalam membangun ekosistem digital, dukungan lintas departemen, dan kepemimpinan yang memahami kompleksitas teknis serta risiko sosial dari transformasi digital. Organisasi yang mampu memahami dan mengelola faktor-faktor tersebut akan menjadi pelaku utama dalam revolusi digital di bidang akuntansi dan audit, sedangkan yang gagal akan tertinggal dalam proses perubahan yang semakin tak terelakkan.

ANALISIS JURNAL NASIONAL 1

1. IDENTITAS JURNAL

Nama Jurnal	:	Jurnal Bisnis & Kewirausahaan (JBK)
Judul Jurnal	:	Pengaruh Audit Internal dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan
Penulis	:	Lu'lu' Nafiati & Rintan Nuzul Ainy
Volume	:	18
Nomor	:	3
Halaman	:	289-300
ISSN	:	P-ISSN : 0216-9843 E-ISSN : 2580-5614
Tahun Terbit	:	2022
Link Jurnal	:	https://doi.org/10.31940/jbk.v18i3.289-300

2. ANALISIS JURNAL

Penelitian yang dilakukan oleh Lu'lu' Nafiati dan Rintan Nuzul Ainy bertujuan untuk menguji pengaruh audit internal dan religiusitas terhadap perilaku kecurangan pelaporan keuangan. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa meskipun kecurangan pelaporan keuangan merupakan jenis kecurangan yang paling jarang terjadi, kerugiannya sangat signifikan dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap informasi keuangan. Berdasarkan laporan ACFE (2018), kerugian median dari kecurangan jenis ini mencapai USD 800.000, jauh lebih besar dibandingkan jenis kecurangan lainnya seperti korupsi atau penyelewengan aset. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang dapat mencegah atau memitigasi terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental dengan desain faktorial 2x2. Subjek penelitian terdiri dari 79 mahasiswa jurusan akuntansi dari salah satu universitas besar di Indonesia yang telah menempuh mata kuliah audit dan analisis laporan keuangan. Variabel bebas terdiri dari dua dimensi, yaitu audit internal (kuat dan lemah) serta tingkat religiusitas (tinggi dan rendah), sementara variabel terikatnya adalah perilaku kecurangan pelaporan keuangan yang diukur dari manipulasi nilai dalam eksperimen. Tingkat religiusitas diukur menggunakan

Muslim Daily Religiosity Assessment Scale (MUDRAS), sedangkan audit internal dimanipulasi melalui skenario yang menggambarkan kekuatan atau kelemahan fungsi audit di lingkungan akademik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal yang kuat secara signifikan dapat mengurangi tingkat kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan audit internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal berperan penting dalam menekan potensi tindakan curang. Hasil ini sejalan dengan temuan dari Puspitasari dan Ardiati (2020), yang menyatakan bahwa keberadaan sistem pengawasan internal yang efektif berbanding terbalik dengan intensi individu untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Ketika sistem pengendalian dirasakan kuat, individu merasa diawasi dan risiko sanksi meningkat, sehingga dorongan untuk melakukan kecurangan menurun. Audit internal yang kuat dalam eksperimen ini digambarkan melalui adanya pengawasan independen (pemeriksa dari dekanat) dan riwayat kinerja audit yang konsisten menemukan pelanggaran. Hal ini menciptakan persepsi risiko yang tinggi bagi pelaku manipulasi.

Sebaliknya, religiusitas yang tinggi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan umum yang menganggap religiusitas sebagai faktor moral yang kuat dalam membentuk perilaku etis. Penelitian ini memperkuat temuan dari Rahmawati dan Listyorini (2019), yang menyatakan bahwa nilai-nilai religius belum tentu dapat teraktualisasi menjadi tindakan nyata dalam konteks profesional jika tidak diimbangi dengan kontrol eksternal yang kuat. Dalam eksperimen ini, meskipun peserta dengan skor religiusitas tinggi menunjukkan tingkat keyakinan agama yang lebih dalam, hal tersebut tidak memengaruhi kecenderungan mereka untuk tidak memanipulasi skor. Faktor situasional dan kesempatan tetap menjadi pendorong utama dalam pengambilan keputusan etis.

Penelitian ini juga menguji interaksi antara audit internal dan religiusitas, namun hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi audit internal kuat dengan religiusitas tinggi tidak memberikan efek tambahan yang signifikan dalam menekan kecurangan. Ini menunjukkan bahwa audit internal memiliki efek yang berdiri sendiri dan lebih kuat dibanding religiusitas dalam konteks pengendalian perilaku kecurangan. Peneliti menyimpulkan bahwa upaya organisasi dalam mencegah

kecurangan sebaiknya difokuskan pada penguatan sistem audit internal sebagai langkah nyata dan dapat diukur.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan literatur akuntansi dan etika bisnis di Indonesia, terutama terkait peran pengawasan internal dan nilai-nilai personal dalam mencegah kecurangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa audit internal yang kuat terbukti efektif dalam memitigasi perilaku kecurangan pelaporan keuangan, sementara religiusitas tidak cukup signifikan sebagai faktor tunggal untuk menghambat perilaku menyimpang. Oleh karena itu, organisasi sebaiknya lebih menitikberatkan pada penguatan tata kelola dan pengawasan internal, tanpa bergantung secara berlebihan pada nilai-nilai personal seperti religiusitas. Penelitian ini juga membuka ruang bagi studi lanjutan untuk mengeksplorasi variabel disposisional lain seperti integritas, norma sosial, atau tekanan kelompok dalam mempengaruhi perilaku etis di lingkungan profesional.

ANALISIS JURNAL NASIONAL 2

1. IDENTITAS JURNAL

Nama Jurnal	:	Jurnal Ekonomi Revolusioner
Judul Jurnal	:	Efektivitas Pengelolaan Keuangan Publik dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Di Kota Medan
Penulis	:	Margareth Sihite
Volume	:	7
Nomor	:	11
Halaman	:	169-174
ISSN	:	24410685
Tahun Terbit	:	November 2024
Link Jurnal	:	https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jer/article/view/6270

2. ANALISIS JURNAL

Penelitian yang dilakukan oleh Margareth Sihite (2024) bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan publik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Kota Medan. Penelitian ini berangkat dari kesadaran akan pentingnya tata kelola keuangan yang baik sebagai fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih, efisien, dan bertanggung jawab. Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan keuangan publik menjadi isu strategis yang menuntut tidak hanya keterbukaan informasi anggaran, tetapi juga penguatan integritas dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan fiskal daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang memadukan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, analisis dokumen keuangan, serta studi literatur. Dengan fokus pada Kota Medan, penelitian ini menggambarkan bagaimana sistem, kebijakan, dan praktik pengelolaan keuangan dijalankan dalam realitas pemerintahan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan telah menunjukkan komitmen untuk mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sistem seperti e-budgeting dan e-reporting telah diimplementasikan guna memberikan akses informasi anggaran kepada masyarakat secara terbuka dan real-time. Data mengenai alokasi dan realisasi anggaran dipublikasikan melalui situs resmi pemerintah daerah, memungkinkan masyarakat

mengetahui ke mana dana publik dialokasikan. Namun, temuan di lapangan memperlihatkan bahwa upaya peningkatan transparansi ini belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan. Banyak warga masih merasa kesulitan dalam memahami isi laporan yang bersifat teknis dan kompleks. Hal ini menandakan bahwa transparansi formal belum tentu bermakna secara substantif tanpa didukung oleh pemahaman publik yang memadai.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Setiawan (2019) yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi anggaran belum mampu meningkatkan pengawasan publik apabila literasi keuangan masyarakat masih rendah. Dalam konteks Kota Medan, informasi telah tersedia, tetapi partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran masih minim. Banyak masyarakat yang tidak memiliki kemampuan atau akses yang cukup untuk mengevaluasi apakah anggaran digunakan secara efisien, tepat sasaran, atau justru menyimpang. Karena itu, peningkatan literasi keuangan masyarakat menjadi langkah penting dalam membangun akuntabilitas publik yang berbasis partisipasi.

Selain aspek transparansi, penelitian ini juga menyoroti bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Kota Medan masih mengalami tantangan serius. Meskipun terdapat audit rutin dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit seringkali mengalami kendala, baik dari sisi teknis maupun koordinasi antarunit organisasi. Beberapa temuan audit yang bersifat berulang mencerminkan adanya kelemahan dalam implementasi sistem pengawasan dan pengendalian internal. Hasil wawancara dengan informan kunci dari kalangan auditor dan pejabat daerah menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya penegakan rekomendasi audit menjadi penyebab utama belum optimalnya akuntabilitas. Temuan ini diperkuat oleh Haryanto (2021), yang menyatakan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal sering kali menjadi penyebab utama akuntabilitas fiskal yang rendah, walaupun transparansi secara administratif telah dilakukan.

Aspek lain yang ditelaah dalam penelitian ini adalah peran teknologi informasi sebagai instrumen pendukung tata kelola keuangan publik. Dalam konteks Kota Medan, penggunaan aplikasi keuangan daerah seperti e-budgeting dan Siskeudes terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi pelaporan, dan mempercepat proses perencanaan hingga pelaporan anggaran. Meskipun begitu, efektivitas teknologi ini bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Penelitian

menunjukkan bahwa tidak semua aparat pemerintah daerah terbiasa menggunakan sistem informasi berbasis digital, terutama di wilayah kelurahan dan kecamatan yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan pelatihan teknis. Kondisi ini juga memengaruhi kualitas data dan kecepatan pembaruan informasi yang dapat diakses publik.

Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah masih sangat terbatas. Musrenbang sebagai forum partisipatif belum berjalan optimal karena rendahnya keterlibatan warga dalam menyampaikan aspirasi atau mengevaluasi anggaran. Partisipasi publik cenderung simbolik, terbatas pada tahap awal tanpa tindak lanjut yang jelas. Rendahnya pemahaman terhadap proses anggaran dan laporan keuangan menjadi penghambat utama, sejalan dengan temuan Siregar (2020) yang menyebutkan lemahnya pengawasan masyarakat disebabkan oleh minimnya literasi teknis dan kesadaran akan hak akses informasi fiskal.

Implikasinya, reformasi pengelolaan keuangan daerah memerlukan pendekatan holistik, tidak hanya lewat pengembangan teknologi informasi, tetapi juga penguatan kapasitas kelembagaan dan edukasi publik. Pemerintah Kota Medan perlu mendorong pelatihan teknis bagi pegawai, sosialisasi anggaran kepada masyarakat, dan penyediaan kanal partisipasi yang efektif. Selain itu, sistem pengawasan internal dan legislatif harus diperkuat, serta didukung oleh regulasi tegas terhadap ketidakpatuhan atas temuan audit oleh lembaga eksternal seperti BPK.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun pengelolaan keuangan publik di Kota Medan telah mengalami perbaikan signifikan dalam hal transparansi melalui sistem digital, akuntabilitas dan partisipasi publik masih merupakan tantangan utama yang perlu segera diatasi. Keterbatasan dalam pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan, lemahnya pengawasan internal, serta partisipasi masyarakat yang rendah menjadi faktor-faktor penghambat utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang ideal. Untuk itu, dibutuhkan upaya kolaboratif dari pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dan lembaga pengawas untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi perumusan kebijakan pengelolaan keuangan publik, serta menjadi pijakan awal untuk pengembangan penelitian selanjutnya di berbagai daerah lain di Indonesia.

ANALISIS JURNAL NASIONAL 3

1. IDENTITAS JURNAL

Nama Jurnal	:	Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi
Judul Jurnal	:	Analisis Implementasi Aplikasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Menggunakan Model Kesuksesan Sistem Delone dan Mclean
Penulis	:	Maria Amelia Rara Pangesti & Yuki Firmanto
Volume	:	3
Nomor	:	2
Halaman	:	1018–1032
ISSN	:	3025-1192
Tahun Terbit	:	November 2024
Link Jurnal	:	https://repository.ub.ac.id/id/eprint/233347/

2. ANALISIS JURNAL

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi aplikasi Sistem Aplikasi Pemeriksaan Laporan Keuangan (SiAP-LK) di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi dari DeLone dan McLean. Latar belakang penelitian ini berangkat dari semakin masifnya digitalisasi dalam lingkungan pemerintahan, yang menuntut adanya sistem informasi yang mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi dalam pelaksanaan audit keuangan negara. Penggunaan SiAP-LK diharapkan dapat mengatasi permasalahan klasik seperti ketidaktertiban dokumentasi, keterlambatan pelaporan, dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan audit di lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara kepada empat auditor BPK RI yang merupakan pengguna aktif SiAP-LK. Data pendukung juga diperoleh dari studi dokumen dan literatur terkait. Lima dimensi dari model DeLone dan McLean yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Dimensi penggunaan tidak digunakan karena sistem ini bersifat wajib (mandatory) bagi auditor BPK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem SiAP-LK secara umum dinilai baik oleh para pengguna. SiAP-LK dianggap mudah digunakan (user-friendly), memiliki antarmuka yang sederhana, dan mampu diakses secara real-time. Namun, masih ditemukan kendala dalam hal keandalan sistem, khususnya ketika terjadi lonjakan pengguna di akhir masa pelaporan yang menyebabkan sistem melambat atau terjadi gangguan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keandalan sistem masih perlu ditingkatkan untuk mendukung stabilitas aplikasi di masa beban kerja tinggi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Wara, Kalangi & Gamaliel (2021) yang menemukan bahwa SiAP-LK di BPK Sulawesi Utara masih menghadapi hambatan teknis seperti kesulitan dalam mengunggah dokumen besar dan keterbatasan infrastruktur jaringan.

Kualitas informasi yang dihasilkan oleh SiAP-LK juga dinilai baik. Informasi yang disediakan dianggap lengkap, relevan, akurat, dan mudah dipahami oleh auditor. Seluruh tahapan pemeriksaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan sudah terintegrasi dalam sistem, dan informasi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemeriksaan. Peneliti mengaitkan hal ini dengan hasil studi Siregar (2017) yang menyimpulkan bahwa kelengkapan dan keakuratan informasi adalah dua faktor utama dalam meningkatkan kepuasan pengguna sistem informasi di sektor publik.

Selanjutnya, kualitas pelayanan dari penyedia sistem, dalam hal ini Biro TI BPK RI, juga mendapatkan respons positif dari para responden. Mereka menilai bahwa tim pengembang sistem memberikan layanan bantuan yang responsif, baik melalui layanan pengaduan resmi (Melati) maupun komunikasi langsung. Permintaan perbaikan sistem juga ditindaklanjuti dengan cepat, dan fitur-fitur baru disosialisasikan secara berkala. Kualitas pelayanan ini terbukti berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, sebagaimana dikemukakan oleh Pambudi (2018) dalam penelitiannya mengenai sistem informasi akuntansi pemerintah daerah yang menyatakan bahwa kualitas layanan merupakan salah satu prediktor utama terhadap penerimaan sistem.

Dalam dimensi kepuasan pengguna, penelitian ini menemukan bahwa para auditor merasa terbantu dengan adanya SiAP-LK, terutama dalam efisiensi kerja, akses data yang real-time, serta penyederhanaan proses dokumentasi. Auditor tidak lagi harus membawa dokumen fisik, karena semua dokumen tersimpan dalam sistem. Selain itu,

sistem memfasilitasi kolaborasi antaranggota tim, memberikan ruang komunikasi untuk reviu pekerjaan, serta mempermudah pemantauan kinerja tim audit. Hal ini berdampak langsung pada produktivitas dan efektivitas kerja auditor.

Dimensi terakhir, yaitu manfaat bersih, menunjukkan bahwa SiAP-LK memberikan dampak positif tidak hanya bagi individu auditor, tetapi juga organisasi secara keseluruhan. Sistem ini meningkatkan pengendalian mutu, mendorong ketepatan waktu pelaporan kepada DPR, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Pemantauan kinerja auditor dapat dilakukan secara lebih objektif karena seluruh proses terekam dalam sistem. Penggunaan sistem ini juga mengurangi risiko manipulasi data karena seluruh jejak pemeriksaan terdokumentasi dengan baik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi SiAP-LK di lingkungan BPK RI dinilai cukup sukses menurut lima dimensi model DeLone dan McLean. Meski masih ada beberapa kendala teknis pada aspek keandalan sistem, pengguna secara umum merasa puas dan merasakan manfaat nyata dari penggunaan sistem ini. Dengan demikian, SiAP-LK tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi telah menjadi sistem yang mendukung kinerja profesional auditor dalam meningkatkan mutu dan akuntabilitas pemeriksaan keuangan negara.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam bidang akuntansi sektor publik dan audit berbasis teknologi, dengan menunjukkan bahwa keberhasilan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana sistem tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan pengguna secara langsung. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan keandalan sistem dan infrastruktur pendukung, serta perlunya pelatihan rutin bagi auditor agar dapat memaksimalkan fungsi-fungsi yang tersedia dalam sistem. Penelitian ini juga membuka peluang bagi pengembangan penelitian lanjutan yang mengevaluasi dampak jangka panjang dari penggunaan sistem informasi seperti SiAP-LK terhadap kualitas opini audit dan persepsi publik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

ANALISIS JURNAL NASIONAL 4

1. IDENTITAS JURNAL

Nama Jurnal	:	Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS)
Judul Jurnal	:	Analisis Efektivitas Pemeriksaan Akuntansi terhadap Pengendalian Internal Akuntansi
Penulis	:	Irna Susilawati, Kasmanto Miharja, Indriyani Diwantari & Lutfia Putri Salsabila
Volume	:	3
Nomor	:	3
Halaman	:	60-74
ISSN	:	P-ISSN : 2963-8194 E-ISSN : 2963-7643
Tahun Terbit	:	Agustus 2024
Link Jurnal	:	https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i3.3745

2. ANALISIS JURNAL

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemeriksaan akuntansi terhadap pengendalian internal akuntansi pada perusahaan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya peran audit atau pemeriksaan akuntansi dalam menjaga keandalan laporan keuangan serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pelaporan. Namun demikian, efektivitas pemeriksaan tidak hanya bergantung pada kemampuan auditor semata, melainkan juga pada sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami keterkaitan antara kedua elemen tersebut dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari literatur akademik, jurnal ilmiah, dan buku referensi yang relevan dengan topik pengendalian internal dan pemeriksaan akuntansi. Melalui pendekatan ini, peneliti menyajikan tinjauan teoritis yang komprehensif tentang bagaimana pengendalian internal mendukung efektivitas pemeriksaan akuntansi dalam berbagai sektor industri di Indonesia. Penelitian ini juga memuat sintesis dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, yang memperkuat analisis yang disajikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pengendalian internal memiliki dampak langsung terhadap efektivitas pemeriksaan akuntansi. Perusahaan dengan pengendalian internal yang baik dan konsisten cenderung memiliki pemeriksaan akuntansi yang lebih efektif. Sebaliknya, perusahaan dengan pengendalian yang lemah justru meningkatkan beban kerja auditor karena mereka harus melakukan lebih banyak prosedur deteksi untuk menemukan kesalahan atau potensi kecurangan. Hal ini selaras dengan temuan penelitian Rahmani dan Khairita (2023), yang menyebutkan bahwa penerapan pengendalian internal yang terstruktur dan didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi terhadap kemudahan auditor dalam melakukan penelusuran dan validasi data akuntansi.

Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi bahwa efektivitas pemeriksaan tidak hanya berperan dalam mendeteksi kesalahan, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya fraud. Dalam sistem pengendalian internal yang baik, auditor memiliki dasar untuk melakukan evaluasi yang terarah terhadap risiko-risiko keuangan dan kepatuhan. Hal ini diperkuat oleh Ramdhani (2018) yang menyatakan bahwa pengendalian internal yang kuat, dikombinasikan dengan keberadaan auditor internal dan sistem whistleblowing, dapat menekan peluang terjadinya kecurangan dalam perusahaan.

Dalam pembahasannya, jurnal ini juga memaparkan bahwa lingkungan pengendalian (control environment), penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan merupakan lima komponen utama dalam kerangka COSO yang menjadi standar dalam pengendalian internal. Komponen-komponen ini harus diterapkan secara terintegrasi agar mendukung proses audit yang efisien dan efektif. Penelitian ini menekankan bahwa efektivitas audit dapat tercapai jika auditor memiliki pemahaman menyeluruh terhadap struktur pengendalian internal perusahaan dan mampu menilai apakah prosedur yang ditetapkan sudah dijalankan dengan semestinya.

Dalam konteks perusahaan di Indonesia, peneliti juga menyoroti adanya hambatan dalam implementasi pengendalian internal, seperti budaya organisasi yang kurang mendukung keterbukaan, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengendalian, serta rendahnya kesadaran manajemen terhadap pentingnya sistem kontrol internal yang menyeluruh. Tantangan tersebut berdampak langsung pada efektivitas audit yang dilakukan, di mana auditor tidak dapat sepenuhnya

mengandalkan pengendalian internal sehingga harus mengembangkan prosedur pemeriksaan tambahan yang memakan waktu dan sumber daya.

Salah satu kontribusi penting dari penelitian ini adalah pemaparan tentang hubungan antara pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Berdasarkan studi yang dikutip dalam artikel ini (Pratiwi & Putri, 2022), pengendalian internal yang kuat berkontribusi terhadap pelaksanaan anggaran yang lebih tepat waktu, akurat, dan minim penyalahgunaan dana. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa audit bukan hanya alat evaluasi retrospektif, tetapi juga berperan dalam pengendalian ke depan melalui rekomendasi dan perbaikan sistem pengendalian.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pemeriksaan akuntansi sangat dipengaruhi oleh kualitas pengendalian internal perusahaan. Pemeriksaan akuntansi yang efektif bukan hanya mendeteksi penyimpangan, tetapi juga mendorong akuntabilitas, transparansi, serta memperkuat budaya kepatuhan dalam organisasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat sistem pengendalian internal melalui pelatihan SDM, adopsi teknologi, serta evaluasi berkala atas kebijakan dan prosedur pengawasan internal. Selain itu, peran auditor harus ditingkatkan tidak hanya sebagai pemeriksa, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan manajerial.

Penelitian ini memberikan sumbangan penting dalam literatur audit dan sistem pengendalian internal, khususnya di Indonesia, dan membuka peluang untuk kajian lanjutan berbasis data empiris terhadap sektor-sektor strategis lainnya, seperti BUMN, lembaga pemerintah daerah, atau sektor UMKM. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang sinergi antara audit dan pengendalian internal, diharapkan organisasi mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan tata kelola yang berkelanjutan.

ANALISIS ARTIKEL MEDIA MASA 1

1. IDENTITAS ARTIKEL BERITA

Judul Artikel	:	Kemenag Audit Keuangan 18 BAZNAS dan LAZ untuk Tingkatkan Akuntabilitas Zakat
Publikasi	:	Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia
Penulis	:	Moh Khoeron
Tahun	:	Minggu, 25 Mei 2025 · 21:21 WIB
Website	:	https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-audit-keuangan-18-baznas-dan-laz-untuk-tingkatkan-akuntabilitas-zakat-4j57m

2. ANALISIS ARTIKEL BERITA

Artikel berita yang diterbitkan oleh situs resmi Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia pada Mei 2024 ini mengangkat isu strategis mengenai pelaksanaan audit keuangan terhadap 18 lembaga pengelola zakat di Indonesia, yang terdiri atas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi/kabupaten/kota serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional. Inisiatif audit ini merupakan bagian dari upaya Kemenag untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang selama ini dikumpulkan dan disalurkan kepada masyarakat.

Dalam artikel ini dijelaskan bahwa audit dilakukan atas Laporan Keuangan dan Laporan Pengumpulan dan Penyaluran Zakat (LPZ) tahun 2023. Audit ini dilaksanakan oleh tim akuntan publik independen yang bekerja sama dengan Kemenag melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Tujuan utama dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, audit ini juga menjadi bagian dari pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa setiap lembaga zakat wajib menyampaikan laporan keuangan dan hasil audit secara berkala.

Pentingnya audit dalam konteks ini adalah sebagai bentuk kontrol eksternal atas kinerja lembaga pengelola zakat. Audit yang dilakukan secara independen dan profesional diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola serta mendorong lembaga zakat untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance. Hal ini

sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2009) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik dalam sektor publik dapat dicapai jika terdapat sistem audit dan pelaporan yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, audit keuangan juga menjadi instrumen penting dalam mengukur efisiensi dan efektivitas penyaluran dana sosial keagamaan yang dikelola oleh lembaga amil zakat.

Dari sudut pandang kelembagaan, langkah Kemenag melakukan audit terhadap BAZNAS dan LAZ menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan zakat. Dalam artikel ini disebutkan bahwa hasil audit akan menjadi bahan evaluasi dalam pemberian izin operasional dan klasifikasi lembaga zakat ke depan. Artinya, audit bukan hanya berfungsi sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai dasar kebijakan kelembagaan. Strategi ini sesuai dengan pendekatan risk-based audit yang diterapkan dalam sistem pengawasan modern, di mana temuan audit dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan dan peningkatan kualitas kelembagaan.

Selain itu, audit ini juga berfungsi dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Dalam konteks pengelolaan dana umat, kepercayaan merupakan faktor kunci keberlanjutan. Ketika publik mengetahui bahwa dana yang mereka salurkan diperiksa secara profesional dan laporan keuangannya dapat diakses secara terbuka, maka loyalitas dan partisipasi dalam berzakat akan meningkat. Hal ini diperkuat oleh temuan dari penelitian Widodo & Suparwati (2022) yang menyatakan bahwa transparansi laporan keuangan lembaga zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan dan kepatuhan muzakki (pemberi zakat). Oleh karena itu, audit yang dilakukan Kemenag berpotensi menjadi strategi efektif untuk memperkuat basis penerimaan zakat nasional secara berkelanjutan.

Namun demikian, artikel ini juga secara implisit menunjukkan tantangan besar yang dihadapi dalam penguatan tata kelola zakat, yaitu kapasitas kelembagaan yang belum merata antar lembaga zakat, baik dari sisi SDM, sistem informasi keuangan, hingga pelaporan. Beberapa lembaga zakat mungkin belum memiliki sistem akuntansi zakat berbasis akrual atau belum menggunakan aplikasi pelaporan yang terintegrasi. Oleh karena itu, ke depan, selain audit, dibutuhkan pelatihan dan pendampingan intensif agar seluruh lembaga zakat mampu memenuhi standar akuntansi keuangan syariah dan standar pelaporan yang dikeluarkan oleh IAI dan BAZNAS.

elain manfaat yang telah disebutkan sebelumnya, audit ini juga memiliki potensi untuk mendorong inovasi kelembagaan dalam pengelolaan zakat. Ketika lembaga zakat

menyadari bahwa kinerja keuangannya akan dievaluasi secara terbuka dan profesional, mereka terdorong untuk memperbaiki sistem internal, mengembangkan strategi pengumpulan dan penyaluran yang lebih efektif, serta meningkatkan layanan kepada muzakki dan mustahik. Inovasi tersebut bisa berupa digitalisasi proses distribusi, pelaporan real time berbasis aplikasi, atau integrasi program zakat dengan program-program sosial pemerintah daerah. Dengan demikian, audit tidak hanya menjadi alat evaluatif, tetapi juga katalisator perubahan positif dalam tata kelola zakat nasional.

Di sisi lain, keberhasilan pelaksanaan audit keuangan terhadap lembaga zakat juga memerlukan dukungan regulasi yang kuat dan konsisten. Kementerian Agama perlu mempertegas kebijakan lanjutan bagi lembaga yang tidak mampu memenuhi standar pelaporan dan akuntabilitas, termasuk sanksi administratif atau pencabutan izin operasional. Namun, pendekatan pembinaan tetap harus menjadi prioritas utama, terutama bagi lembaga yang masih dalam tahap pengembangan kapasitas. Dengan keseimbangan antara pengawasan dan pembinaan, maka ekosistem zakat di Indonesia dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan umat.

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa artikel “Kemenag Audit Keuangan 18 BAZNAS dan LAZ untuk Tingkatkan Akuntabilitas Zakat” mencerminkan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana sosial keagamaan melalui mekanisme audit eksternal yang independen. Artikel ini mengandung pesan penting bahwa audit bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam membangun tata kelola yang kredibel, memperkuat kelembagaan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem zakat nasional. Langkah ini juga selaras dengan tren internasional yang mendorong lembaga keuangan sosial Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip governance, transparansi, dan pelaporan keuangan yang dapat diaudit secara terbuka.

ANALISIS ARTIKEL MEDIA MASA 2

1. IDENTITAS ARTIKEL BERITA

Judul Artikel	:	BPK Berikan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024
Publikasi	:	CNBC Indonesia
Penulis	:	Arrijal Rachman
Tahun	:	Selasa, 27 Mei 2025 11:24 WIB
Website	:	https://www.cnbcindonesia.com/news/20250527111940-4-636586/bpk-beri-opini-wtp-atas-laporan-keuangan-pemerintah-2024

2. ANALISIS ARTIKEL BERITA

Artikel berita memuat informasi penting mengenai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP, yang mencakup laporan keuangan dari 82 kementerian/lembaga (K/L) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Opini WTP ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah dianggap telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, menyajikan informasi yang bebas dari salah saji material, serta didukung oleh bukti audit yang memadai.

Kasus ini menjadi penting karena ini merupakan kesembilan kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2016 pemerintah pusat memperoleh opini WTP dari BPK. Capaian ini dipandang sebagai bentuk konsistensi pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Namun demikian, artikel ini juga menggarisbawahi bahwa meskipun pemerintah memperoleh opini tertinggi dalam audit laporan keuangan, BPK tetap menemukan sejumlah permasalahan yang perlu diperbaiki. Masalah-masalah tersebut berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penyimpangan dalam penggunaan dan pelaporan anggaran di beberapa entitas pemerintah.

Artikel ini juga mengungkapkan bahwa opini WTP tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai keberhasilan absolut. Ketua BPK, Isma Yatun, secara tegas menyampaikan bahwa opini WTP tidak menjamin bahwa tidak ada masalah dalam

pelaksanaan anggaran atau bahwa pengelolaan anggaran telah sepenuhnya bebas dari penyimpangan. Penegasan ini penting agar publik memahami bahwa opini audit berfokus pada kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan pada efektivitas program, integritas manajemen, atau keberhasilan pencapaian kinerja. Dalam hal ini, opini WTP harus dimaknai sebagai dasar untuk memperkuat akuntabilitas, bukan sebagai akhir dari proses pertanggungjawaban.

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun aspek pelaporan telah sesuai standar, masih diperlukan pembenahan dalam pengawasan pelaksanaan anggaran, peningkatan kualitas belanja, serta tindak lanjut atas rekomendasi audit. Artikel ini menekankan bahwa BPK mendorong kementerian dan lembaga untuk menyusun rencana aksi yang konkret dalam menindaklanjuti temuan audit serta memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti secara sistematis dan tepat waktu. Hal ini penting untuk memperkuat akuntabilitas kinerja dan mewujudkan penggunaan anggaran yang lebih efisien, efektif, dan berorientasi hasil.

Dari sisi sistem, artikel juga menyoroti bahwa keberhasilan penyusunan laporan keuangan yang memperoleh opini WTP tidak terlepas dari peran sistem informasi keuangan pemerintah yang semakin terintegrasi, seperti penggunaan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dan dukungan dari sistem SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Meski demikian, integrasi sistem ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait konsistensi pencatatan, validitas data antar-unit, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pelaporan berbasis teknologi. Ke depan, kualitas pelaporan keuangan harus terus disempurnakan melalui pembaruan sistem yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan administrasi publik.

Opini WTP yang kembali diberikan kepada pemerintah pusat dalam LKPP Tahun 2024 juga mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran dan komitmen antarkementerian/lembaga dalam menyiapkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Namun demikian, pencapaian ini seharusnya tidak menjadikan pemerintah terlena atau sekadar berfokus pada pencapaian administratif. Dalam artikel dijelaskan bahwa meskipun pemerintah pusat memperoleh opini WTP, masih terdapat sejumlah kementerian dan lembaga yang belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pemeriksaan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem belum sepenuhnya tuntas, dan opini WTP tidak otomatis mencerminkan pengelolaan keuangan yang bebas dari persoalan struktural.

Lebih lanjut, artikel juga menyinggung pentingnya kualitas belanja, yaitu sejauh mana anggaran yang disusun dan dilaksanakan dapat benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, laporan keuangan yang disusun dengan baik belum tentu mencerminkan efektivitas kinerja anggaran di lapangan. Misalnya, kegiatan yang tercatat sesuai rencana dalam laporan belum tentu berdampak maksimal pada peningkatan layanan publik. Oleh karena itu, audit berbasis kinerja perlu menjadi perhatian lanjutan dari BPK maupun aparat pengawasan internal pemerintah, agar pencapaian WTP juga diiringi dengan peningkatan nilai manfaat anggaran yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan nasional, keberlanjutan opini WTP seharusnya menjadi batu loncatan untuk reformasi pengelolaan keuangan yang lebih berorientasi hasil. Pemerintah pusat perlu memanfaatkan momentum ini untuk mendorong perubahan mendasar dalam manajemen fiskal, termasuk peningkatan transparansi penggunaan belanja publik, efisiensi birokrasi anggaran, serta pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi anggaran. Artikel ini secara implisit menggambarkan bahwa WTP adalah prestasi penting, tetapi juga harus menjadi awal dari perubahan menyeluruh menuju tata kelola keuangan yang tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga adil, berdampak, dan partisipatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa opini WTP atas LKPP Tahun 2024 adalah pencapaian yang patut diapresiasi, namun tetap harus dijadikan pijakan untuk perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

ANALISIS ARTIKEL MEDIA MASA 3

1. IDENTITAS ARTIKEL BERITA

Judul Artikel	:	Pemalsuan Laporan Keuangan CEO eFishery Buat Karyawan Dapat Stigma Buruk
Publikasi	:	Tempo
Penulis	:	Dinda Shabrina
Tahun	:	Jum'at, 24 Januari 2025 20.55 WIB
Website	:	https://www.tempo.co/ekonomi/pemalsuan-laporan-keuangan-ceo-efishery-buat-karyawan-dapat-stigma-buruk-1198551

2. ANALISIS ARTIKEL BERITA

Artikel yang diterbitkan oleh Tempo.co ini mengangkat salah satu isu paling sensitif dalam dunia bisnis dan manajemen modern, yakni tindakan pemalsuan laporan keuangan oleh CEO dari salah satu perusahaan rintisan (startup) teknologi terkemuka di Indonesia, eFishery. Perusahaan yang selama ini dikenal sebagai pelopor digitalisasi sektor akuakultur tersebut, tiba-tiba menjadi sorotan publik setelah pemberitaan mengenai manipulasi laporan keuangan mencuat. Artikel ini tidak hanya berfokus pada tindakan CEO secara individu, tetapi juga menyoroti dampak kolektif yang timbul terhadap karyawan dan citra perusahaan secara menyeluruh. Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa banyak karyawan yang merasa dirugikan secara moral karena harus menanggung stigma dari kesalahan yang tidak mereka lakukan. Hal ini menjadi bukti bahwa tindakan etis (atau tidak etis) dari seorang pemimpin berdampak sistemik dan meluas, bahkan hingga ke lini pegawai yang paling bawah.

Pemalsuan laporan keuangan yang dilakukan CEO eFishery ini disebut mencakup tindakan manipulasi pendapatan, penggelembungan nilai aset, dan penyajian informasi fiktif kepada investor maupun pemangku kepentingan internal. Artikel menyebutkan bahwa praktik ini dilakukan untuk mempercantik kondisi keuangan perusahaan demi mendapatkan pendanaan tambahan dari investor, serta menjaga citra perusahaan di tengah persaingan pasar. Langkah ini secara sadar melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi pilar utama dalam sistem pelaporan keuangan, terlebih dalam sektor startup yang kerap mendapat sorotan investor lokal dan global. Ketika informasi keuangan dipalsukan, maka keputusan bisnis yang dibuat atas dasar data tersebut juga akan menjadi keliru dan berpotensi merugikan banyak pihak,

termasuk pengguna layanan, mitra bisnis, hingga karyawan yang telah bekerja keras membangun reputasi perusahaan dari nol.

Dampak dari kasus ini tidak hanya terasa secara struktural di tubuh organisasi, tetapi juga psikologis bagi karyawan. Dalam artikel dijelaskan bahwa para pegawai merasa dipandang negatif oleh masyarakat, menghadapi tekanan sosial dari lingkungannya, dan mengalami penurunan semangat kerja. Mereka bahkan menjadi sasaran tuduhan tak langsung dari pihak luar yang menganggap bahwa seluruh bagian perusahaan pasti mengetahui atau terlibat dalam manipulasi yang dilakukan oleh manajemen puncak. Keadaan ini menimbulkan ketidakadilan yang mendalam bagi karyawan-karyawan profesional yang selama ini bekerja sesuai prosedur dan menjaga integritasnya. Tanpa adanya pemisahan tegas antara pelaku individu dan sistem organisasi, para karyawan menjadi korban dari budaya kepemimpinan yang cacat.

Di sisi lain, artikel ini juga secara implisit mengkritik lemahnya pengawasan internal di perusahaan, baik dari sisi struktur pengendalian manajemen maupun peran komisaris atau pemilik modal dalam melakukan monitoring. Tidak adanya sistem pelaporan yang transparan, keterbatasan fungsi audit internal, serta dominasi mutlak CEO dalam pengambilan keputusan strategis menjadi celah besar yang memungkinkan manipulasi keuangan terjadi tanpa deteksi dini. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya struktur tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang sehat, bahkan sejak fase awal pertumbuhan perusahaan. Ketika pengawasan internal lemah, maka peluang terjadinya fraud meningkat tajam, dan ketika itu terjadi pada startup yang sedang berkembang, maka seluruh fondasi kepercayaan investor dan masyarakat bisa runtuh dalam waktu singkat.

Artikel ini juga menyoroti bagaimana para investor dan mitra bisnis eFishery menjadi lebih berhati-hati pascaterungkapnya kasus ini. Ketidakpercayaan muncul bukan hanya karena nilai kerugian finansial, tetapi juga karena rusaknya kredibilitas yang selama ini dibangun oleh perusahaan. Dalam konteks ini, kredibilitas bukan hanya soal keuntungan bisnis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab sosial, keberlanjutan organisasi, dan perlindungan terhadap hak-hak karyawan. Banyak startup di Indonesia selama ini terlalu fokus pada ekspansi pasar, pencapaian valuasi, dan peningkatan pendanaan, namun mengabaikan pembangunan sistem kontrol dan etika internal yang kokoh. Artikel ini mengingatkan bahwa akuntabilitas bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi merupakan elemen strategis yang menentukan masa depan dan reputasi jangka panjang sebuah entitas bisnis.

Lebih lanjut, artikel ini memberikan gambaran bahwa dalam ekosistem bisnis digital yang serba cepat dan kompetitif, tekanan untuk selalu tumbuh dan memperoleh pengakuan pasar sering kali membuat pimpinan perusahaan mengambil jalan pintas yang membahayakan. Dalam kasus ini, CEO eFishery memilih untuk memalsukan laporan keuangan demi menciptakan ilusi stabilitas dan keberhasilan finansial. Sayangnya, tindakan ini tidak hanya membahayakan posisi pribadinya, tetapi juga mencoreng nama baik seluruh entitas perusahaan, menghancurkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun, dan mengorbankan para pegawai yang tidak bersalah. Di sinilah pentingnya kepemimpinan berbasis etika, yaitu kepemimpinan yang tidak hanya mengejar target bisnis, tetapi juga menjunjung tinggi integritas, keterbukaan, dan tanggung jawab.

Kasus ini menjadi refleksi nyata bahwa pemalsuan laporan keuangan tidak hanya berdampak pada neraca perusahaan, tetapi juga terhadap dimensi sosial, psikologis, dan moral dalam lingkungan kerja. Ketika satu orang di posisi puncak menyalahgunakan kekuasaan dan otoritasnya, seluruh sistem organisasi bisa terdampak. Karyawan yang tidak mengetahui apa-apa menjadi korban stigma, loyalitas publik menjadi goyah, dan investor pun menarik diri. Artikel ini menegaskan pentingnya edukasi keuangan, etika bisnis, dan mekanisme pelaporan yang jelas sebagai bagian dari budaya perusahaan modern. Jika perusahaan ingin tumbuh secara berkelanjutan, maka transparansi, pengawasan internal, dan pelibatan semua pihak dalam menjaga integritas harus menjadi bagian dari strategi utama sejak awal.

Maka dari itu kesimpulan dari rtikel ini menggambarkan bahwa kasus pemalsuan laporan keuangan oleh CEO eFishery bukan hanya merugikan perusahaan secara hukum dan finansial, tetapi juga secara moral dan psikologis, khususnya terhadap para karyawan yang tidak terlibat langsung. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa akuntabilitas pimpinan adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik, dan bahwa reputasi korporasi dibangun tidak hanya dari performa bisnis, tetapi juga dari integritas yang dijaga bersama oleh seluruh lini organisasi. Dengan demikian, membangun sistem pengawasan dan budaya kejujuran sejak awal merupakan langkah tak tergantikan untuk mencegah kerusakan yang bisa menyebar luas ke seluruh struktur organisasi akibat kesalahan satu orang di puncak kepemimpinan.

ANALISIS LAPORAN AUDIT PERUSAHAAN

1. IDENTITAS LAPORAN

Judul Laporan	:	Laporan Posisi Keuangan Publikasi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Tani Tulang Bawang Barat (Perseroda) Maret 2025
Publikasi	:	Website Tulang Bawang Barat https://bprstanitbb.co.id/
Tahun	:	28/04/2025 11.01.24 WIB
Link Download	:	https://drive.google.com/file/d/1Ar_wCrX1fRkscq0oEeXZfxfp2ZmEPTRQ/view?usp=sharing

2. ANALISIS LAPORAN

Laporan posisi keuangan PT BPRS Tani Tulang Bawang Barat (Perseroda) per Maret 2025 menyajikan kinerja keuangan dan tata kelola yang cukup komprehensif. Total aset bank tercatat sebesar Rp56,18 miliar, meningkat signifikan dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp44,26 miliar. Peningkatan aset ini terutama disumbang oleh lonjakan piutang Murabahah dari Rp21,90 miliar menjadi Rp34,72 miliar, serta pertumbuhan piutang Multijasa dari Rp8,81 miliar menjadi Rp16,43 miliar. Kenaikan ini mengindikasikan ekspansi penyaluran dana yang agresif namun tetap dalam batas yang terukur. Sementara itu, penempatan dana pada bank lain justru mengalami penurunan dari Rp5,97 miliar menjadi Rp4,06 miliar, yang menandakan bahwa dana lebih banyak dialihkan untuk aktivitas pembiayaan langsung.

Dari sisi liabilitas, terjadi kenaikan signifikan dalam simpanan pihak ketiga, khususnya pada tabungan Wadiah yang tumbuh dari Rp3,22 miliar menjadi Rp5,48 miliar, serta deposito Mudharabah yang naik dari Rp3,33 miliar menjadi Rp4,35 miliar. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk simpanan bank. Dana pihak ketiga yang meningkat juga sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembiayaan. Liabilitas kepada bank lain juga naik dari Rp28,10 miliar menjadi Rp35,30 miliar, menunjukkan bahwa bank memanfaatkan fasilitas antarbank sebagai sumber pendanaan. Di sisi ekuitas, modal disetor tetap sebesar Rp7,1 miliar dengan pertumbuhan saldo laba belum ditentukan sebesar Rp219 juta dari sebelumnya Rp164 juta, yang menunjukkan akumulasi laba berjalan yang ditahan.

Laporan laba rugi per Maret 2025 menunjukkan bahwa pendapatan dari penyaluran dana meningkat menjadi Rp2,08 miliar dari Rp1,62 miliar pada tahun sebelumnya. Komponen pendapatan terbesar berasal dari piutang Murabahah sebesar Rp1,39 miliar, diikuti oleh piutang Multijasa Rp632 juta, dan bagi hasil Mudharabah

sebesar Rp37 juta. Setelah dikurangi bagi hasil untuk pemilik dana sebesar Rp746 juta, pendapatan bersih dari penyaluran dana mencapai Rp1,33 miliar. Beban operasional naik dari Rp892 juta menjadi Rp1,07 miliar, didominasi oleh beban administrasi dan umum. Laba bersih bank untuk periode ini tercatat Rp201,92 juta, mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp164 juta. Pertumbuhan ini menunjukkan keberhasilan pengendalian beban dan peningkatan pendapatan secara bersamaan.

Dalam aspek rasio keuangan, beberapa indikator penting menunjukkan kinerja yang cukup solid. Rasio KPMM berada pada level 21,71%, masih berada jauh di atas ambang minimum yang ditetapkan regulator, menunjukkan kecukupan modal yang baik. ROA tercatat sebesar 1,95%, sementara rasio BOPO berada di angka 49,91%, mengindikasikan efisiensi operasional yang cukup optimal untuk bank di kategori BPR. NPF gross berada pada 3,34% dan NPF net di 0,82%, yang meskipun tergolong cukup aman, perlu terus dimonitor agar tidak mengalami peningkatan di masa mendatang. Cash Ratio sebesar 19,80% relatif rendah dan menunjukkan pentingnya pengelolaan likuiditas jangka pendek yang lebih hati-hati, terutama dalam menghadapi fluktuasi permintaan penarikan dana.

Laporan juga menampilkan informasi distribusi bagi hasil, yang menunjukkan bahwa bank telah menyalurkan pendapatan dari pembiayaan kepada pemilik dana berdasarkan nisbah yang disepakati. Tabungan dan deposito Mudharabah tetap menjadi sumber utama penghimpunan dana dengan nisbah bervariasi sesuai jangka waktu. Pendapatan dari penyaluran dana mencapai lebih dari Rp2 miliar, sementara total bagi hasil yang dibagikan sebesar Rp38 juta. Penempatan dana pada bank lain dan piutang Murabahah merupakan kontributor terbesar terhadap pendapatan tersebut. Dalam aspek ini, transparansi dalam pelaporan distribusi bagi hasil telah disajikan dengan baik dan rinci.

Selain aspek keuangan, laporan juga memberikan informasi menyeluruh mengenai kondisi dan praktik tata kelola perusahaan. Direksi, Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah tercantum secara lengkap dalam struktur organisasi, mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan regulator dan pelaksanaan prinsip transparansi. Tidak hanya itu, pelaporan menyebutkan bahwa laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen, yang memberikan jaminan kualitas terhadap penyajian informasi keuangan. Proses audit ini penting sebagai bentuk pengawasan eksternal dan peningkatan akuntabilitas publik, sekaligus mendukung

upaya bank dalam membangun kepercayaan dari stakeholder eksternal seperti regulator, nasabah, dan investor.

Aspek yang juga tidak luput dari perhatian dalam laporan ini adalah tidak adanya aktivitas pada pos zakat, wakaf, dan dana kebajikan untuk periode pelaporan ini. Meskipun tidak ada transaksi tercatat, pelaporan tetap dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pelaporan syariah yang akuntabel. Ke depan, bank dapat mengembangkan peran sosial ini secara lebih aktif sebagai bagian dari tanggung jawab sosial keuangan syariah. Selain itu, pengelolaan dana-dana sosial melalui lembaga zakat atau dana kebajikan internal dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kebermanfaatan bank syariah bagi komunitas lokal. Potensi ini dapat dikembangkan sebagai strategi diferensiasi layanan BPRS terhadap pesaingnya di sektor keuangan mikro dan syariah.

Maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan dan tata kelola PT BPRS Tani Tulang Bawang Barat (Perseroda) posisi Maret 2025 mencerminkan kinerja yang cukup solid dengan pertumbuhan pembiayaan, peningkatan pendapatan, dan laba yang berkesinambungan. Rasio-rasio keuangan menunjukkan kondisi yang sehat dan efisien, meskipun beberapa aspek seperti cash ratio dan liabilitas antarbank perlu diawasi secara ketat. Laporan ini telah disusun dengan struktur yang jelas, informatif, dan memenuhi standar pelaporan OJK, mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan keuangan syariah. Jika konsistensi kinerja dan tata kelola ini terus dijaga dan ditingkatkan, maka bank memiliki prospek yang kuat untuk terus tumbuh secara berkelanjutan serta memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat daerah.